

BAB VI

SARAN

Saran yang diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Tirta Farma adalah sebagai berikut :

1. Calon apoteker harus belajar ilmu komunikasi agar dapat mengetahui bagaimana agar Apoteker dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang penggunaan obat secara rasional.
2. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
3. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat mengungkapkan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya, berikut obat-obat yang sudah di gunakan, dalam hal ini peran apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan swamedikasi.
4. Apotek Tirta Farma disarankan dapat meningkatkan penggunaan Patient Medication Record (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kefarmasian kepada pasien serta untuk menjalankan peran apoteker dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkes RI dan IAI, 2011. *Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik (CPFB) Good Pharmacy Practice (GPP)*. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.
- Lacy, F. C., Armstrong, L. L., Goldman, P. M. and Lance, L. L., 2009. *Drug Information Handbook*, ed. 17th. American Pharmacists Association, North American.
- McEvoy, G. K., 2011. *AHFS Drug Information Essential*. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 1980. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 Tahun 1965 tentang Apotek*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 1993. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2002. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*. Menteri Kesehatan. Jakarta.

- Menkes RI, 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Menteri Kesehatan. Jakarta.
- Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc. [2015]. *MIMS Drug Information System*. [Online]. <http://mims.com/Indonesia/drug/info/Buscopan%20Plus/>, [2015, Oktober 30].
- Presiden RI, 1997, *Undang-Undang No. 5 tentang Psikotropika*. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009, *Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika*. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2008. *Manajemen Farmasi : Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, ed. 2th. Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sweetman, S. C., 2009. *Martindale The Complete Drug Reference*, ed. 36th. The Pharmaceutical Press, London.
- Tatro, D.S., 2003, *A to Z Drug Facts*, Facts and Comparisons.